

Hutang & Politik Penindasan

Eko Prasetyo

The dramatic economic crisis, which brought to the fall of Soeharto, can be considered as the turning point for the relation between Indonesia and several donor countries as well as international financial and monetary institutions. The eagerness of the country to release itself from the debt has led them to unconditionally follow the instruction of the mentioned financial and monetary institutions. Unfortunately, like in other various poor countries, their instruction does not promise the welfare of the people in the country. Therefore, the suggested solution is that Indonesian government has to maximize in eradicating corruption in all government bodies. Besides, it also has to optimize the performance of BPPN in, for example, selling assets, instead of persuading donor institutions for other bigger foreign debt.

Kekayaan hendaknya tidak terlampau besar sehingga seorang manusia dapat membeli tetangganya, ataupun terlalu kurang sehingga seorang manusia terpaksa menjual diri
(JJ Rousseau)

Pengantar

Sidang ke 11 Consultative Group on Indonesia yang berakhir Kamis, 8 november 2001, memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia senilai US\$ 3,14 miliar. Injeksi utang baru ini memang akan memperpanjang usia pemerintahan Megawati dan utamanya menghindarkan Indonesia dari vonis *default* istilah sopan dari kebangkrutan. CGI juga menjadi indikator kesuksesan Indonesia untuk meminta

uluran tangan IMF maupun kreditor-kreditor komersial —yang tergabung dalam Klub Paris— untuk menegosiasikan atau meminta utang baru. Dalam situasi kebangkrutan ekonomi sekarang ini nampak pemerintah tidak punya jalan lain untuk menutup defisit anggaran kecuali dengan berhutang. Hutang menjadi 'kewajiban' bagi pemerintahan siapapun di Indonesia untuk mengail kepercayaan dunia International. Mitos inilah yang membuat pemerintah

selalu bangga jika mendapatkan hutang baru bahkan menjadi basis legitimasi bagi kekuasaan terutama tim ekonominya.

Padahal jika menilik jumlah hutang yang ada, yang kini telah mencapai US\$ 144 milyar-lebih dari separo adalah hutang pemerintah-ditambah dengan beban obligasi maka posisi utang pemerintah sudah melampaui produk domestik bruto (PDB). Dengan asumsi suku bunga sampai ditekan 14% (kini bertengger suku bunga 17,5%) maka dana yang disiapkan untuk membayar hutang tahun depan tak kurang dari Rp 87 triliun atau 26% dari total bujet. Beban berat pembayaran hutang inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi yang akibatnya akan diterima oleh rakyat. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk mencicil utang telah mengabaikan sejumlah sektor-sektor penting khususnya yang bersangkutan-paut dengan hajat hidup rakyat. Alokasi dana untuk mengentaskan pengangguran, pembangunan rumah bagi para tuna wisma maupun subsidi bagi kebutuhan publik kini dialihkan untuk pembayaran cicilan hutang. Juga dampak yang tak kalah serius adalah ditekanya pengeluaran rutin negara untuk membiayai sasaran yang lebih produktif. Sehingga beban pembayaran bagaimanapun juga akan ditanggung oleh setiap rakyat yang tinggal di Indonesia.¹

Memang, persoalan hutang kini telah jadi beban bagi banyak negara terutama untuk kawasan Asia yang ditimpa krisis ekonomi. Melalui hutang yang membuat Indonesia dalam posisi yang sangat 'tergantungan' pada banyak Badan-badan International telah menjebak kekuatan politik manapun yang berkuasa. Keadaan yang tragis dan ironis, karena sulit dibantah, hutang telah menjadi sumber legitimasi 'terpenting' bagi sebuah kursi kekuasaan. Dengan menempuh pembiayaan melalui

hutang, Indonesia sebenarnya diikat dalam serikat perdagangan International yang memiliki aturan dan hukuman sendiri. Tulisan ini tidak memberi pengamatan ekonomi atas fenomena hutang melainkan akan melihat potensi politik dan sosial yang mengancam dari diterapkannya kebijakan hutang. Yang dipersoalkan memang bukan mampu tidaknya pemerintah membayar hutang tapi bagaimana hutang itu 'menjerat' satu negara untuk bergantung dan berada di bawah kekuasaan badan-badan International.

Jebakan Hutang di Tangan Pemerintahan yang Loyo

Krisis dramatis yang membawa kejatuhan Soeharto merupakan titik tolak yang pas bagi hubungan Indonesia dengan badan-badan keuangan International. Keinginan untuk keluar dari krisis menyebabkan Indonesia mematuhi semua petunjuk penyelesaian yang ditawarkan oleh Bank Dunia maupun IMF. Yang dimaksud dengan 'petunjuk penyelesaian' yang dibungkus dengan bahasa kesepakatan-adalah tata aturan bagi negara yang ingin memperoleh pinjaman. Hal ini tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang secara resmi ditandatangani oleh Soeharto untuk kemudian isi perjanjian 'diamalkan' oleh penguasa penggantinya. Muatan

¹Bila utang dikonkritkan bebannya kepada setiap warga negara Indonesia, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menghitung itu berarti setiap warga negara, mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang yang paling lanjut usianya, harus menanggung beban Rp 7,3 juta. Lihat Kompas 5 Nov 2001.

perjanjian dalam Lol merupakan jawaban atas persoalan krisis, yang menurut IMF dan Bank Dunia, akarnya terletak pada ketidak-becusan pemerintah. Pemerintah dianggap telah berlaku sewenang-wenang dan melakukan praktek kotor selama berkuasa.

Bagi IMF dan Bank Dunia campur tangan pemerintah perlu 'diarahkan' sehingga otoritas yang dimilikinya mampu untuk memperkuat kerja dari mekanisme pasar. Secara ringkas Milton Friedman memberikan lukisan peran pemerintah yang 'benar',.....*Ruang lingkup pemerintahan harus dibatasi...untuk menegakkan hukum dan ketertiban, memperluas kontrak-kontrak swasta, membantu perkembangan pasar yang kompetitif.* Pesan inilah yang disuarakan dalam Lol serta resep yang juga pernah diuji-cobakan oleh Bank Dunia dalam program Structural Adjustment Loan (SAL) pada akhir tahun 70-an. Dalam sejarah pemikiran ekonomi resep IMF dan Bank Dunia ini merupakan implementasi dari paham Neoliberalisme yang secara bersemangat diterapkan sejak masa pemerintahan Reagan dan Thatcher. Gagasan pembangunan Neoliberal ini mengandaikan kembali bertahannya model ideal dari pembangunan kapitalis dengan menyingkirkan peran besar dari pemerintah. Dengan penyingkiran peran pemerintah maka segala usaha pembangunan ekonomi diorientasikan pada penguatan sektor swasta dan mulai mendorong liberalisasi pasar secara maksimal.

Sangat sedikit² memang yang melihat akar krisis Asia ini terletak pada jebakan hutang yang dibuat oleh pemerintah. Kontribusi penting dari krisis Asia ini bukan semata-mata 'kerja buruk' pemerintah melainkan juga pengaruh sektor swasta yang menjalankan kegiatan berhutang. Dengan menunjuk pada titik waktu dimulainya *jouran* utang swasta pada bank-bank luar

negeri dan dialokasikan untuk kepentingan proyek-proyek beresiko tinggi; maka ancaman terhadap neraca berjalan mulai muncul. Sejak tahun 1994, dalam catatan Iwan Jaya Aziz, pemerintah maupun sektor swasta tidak menunjukkan kecermatannya dalam mengambil keputusan untuk berhutang. Dengan penumpukan hutang swasta dibarengi dengan liberalisasi keuangan yang lemah jaminan hukumnya; maka guncangan mata uang dengan gampang mengamburkan sendi-sendi ekonomi yang tampak kukuh pada masa sebelumnya. Manuel F Montes, seorang ekonom Asing, menunjukkan kesalahan fundamental yang membawa Asia dalam jurang krisis adalah pertama, pinjaman dana mata uang asing (dollar) yang berlebihan oleh swasta; kedua kesalahan alokasi utang tersebut; ketiga kebijakan pemerintah yang memberikan keistimewaan pada sektor swasta.

Tiga kebijakan dasar ini bertolak dari pandangan pelucutan peran negara dengan memberikan ruang partisipasi luas kepada kaum pemodal. Dalam bahasa Joel Hellman dinyatakan....'ketakutan akan negara Leviathan telah beralih menjadi kecemasan akan kekuasaan besar kaum pemodal untuk menjarah negara...dalam upaya menciptakan rente'³ Negara dihilangkan kapasitasnya sebagai kekuatan pengelola dengan menyerahkan pengelolaan bisnis

²Dalam catatan Adrinof, A Chaniago, pengamat yang cukup jeli melihat akar krisis adalah Iwan Jaya Aziz dan salah seorang dari luar yakni Manuel F Montes yang melihat peran penting dari kalangan swasta Indonesia dalam memperbesar jumlah hutang. Lihat Adrinof, *Gagalnya Pembangunan*, LP3ES, 2001.

³Lihat B Hery Priyono; Sesudah Negara Dilucuti, Kompas, 18 Oktober 2001.

pada kekuatan swasta. Kebijakan istimewa ini bertolak dari ketentuan yang secara internasional telah ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization) dimana Indonesia ikut terlibat di dalamnya. WTO telah mendorong digagasnya rezim perdagangan multilateral dimana proses liberalisasi perdagangan menjadi target utamanya. Liberalisasi investasi yang menjadi agenda dalam WTO, bukan untuk mengalirkan dana investasi ke negara berkembang, melainkan untuk melindungi investor dari berbagai peraturan nasional.⁴ Dengan bertolak dari dasar penyeragaman kebijakan kompetisi bagi semua negara anggota WTO maka bahaya yang muncul adalah terpukulnya sektor usaha kecil dan menengah.

Penting untuk dicatat dalam perkembangannya kemudian liberalisasi pasar ini bukan semata-mata melucuti peran negara melainkan juga proses melembagakan pasar tersebut agar terbebas dari campur tangan politik. Dengan kata lain, tujuan terpenting dari perubahan ekonomi belakangan ini, adalah melindungi ekonomi dari segala bentuk tekanan politik. Sehingga kemunculan bantuan keuangan merupakan kata manis dari hutang-selalu dikaitkan dengan kewajiban bagi negara penerima untuk mereformasi rezim pemerintahan mereka. Usaha ini misalnya muncul dalam kalimat, Michael Camdessus, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) yang menengarai bahwa...” peran IMF dalam hal pemerintahan sudah berkembang selama bertahun-tahun, dan pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin meningkatkan arti penting mandat tradisional kami memajukan stabilitas perekonomian dan apa yang saya sebut dengan laju pertumbuhan bermutu tinggi (Camdessus, 1988:1)⁵

Dengan mengkarantina peran negara, maka pemberian hutang didasarkan pada

sejumlah prasyarat yang tidak ringan. Apalagi pengalaman pada masa-masa sebelumnya, hutang yang diperoleh ternyata dicuri, diselewengkan dan dikorupsi oleh para pejabat negara. Masyarakat umum, pada masa Orde Baru,⁶ tidak pernah menerima keuntungan dari tingginya jumlah hutang malah kini mendapat beban membayar cicilan hutang. Korupsi dalam skala besar dan sistemik ini juga secara

⁴Itu sebabnya dalam Konferensi Tingkat Menteri IV (KTM IV) Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization) yang berlangsung 9-14 November 2001 di Qatar dibayangi oleh tekanan negara maju untuk mengagendakan isu baru yakni, liberalisasi investasi, pembelanjaan pemerintah, kebijakan kompetisi dan fasilitas perdagangan. Negara berkembang tentu keberatan dengan isu-isu diatas dan mereka menginginkan adanya kajian ulang kesepakatan atas WTO serta masalah implementasi. Protes dari masyarakat sipil pada WTO adalah tuntutan agar WTO hanya mengurus perdagangan barang secara International dan tidak berkecimpung dalam pengaturan produk pertanian, jasa pelayanan publik, hak paten atas makhluk hidup Lihat Hira P Jhamtani *Mengantisipasi Perundingan WTO*, Koran Tempo 9 November 2001.

⁵Lihat Kanishhka Jayasuriya, *Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global*, dalam Wacana edisi VII *Krisis & Bencana Pembangunan*.

⁶Dana pinjaman Bank Dunia kepada pemerintah Soeharto yang terkenal korup mencapai angka US\$ 30 milyar antara tahun 1996 sampai 1988, Menurut perkiraan yang paling tepat untuk saat ini, kurang lebih sepertiga, atau US\$ 10 milyar merupakan hutang kriminal atau hutang yang dikorupsi. Lihat Jeffery A Winters, *Hutang Kriminal*, Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia, dalam *Kejahatan Hutang Luar Negeri Wacana No III/1999*.

langsung dipengaruhi oleh ketidakmampuan dari Bank Dunia untuk melakukan kontrol atas sejumlah hutang yang diberikannya pada pemerintah yang korup. Padahal tertera jelas dalam Piagam Pendirian, Bank Dunia diharuskan "menjamin bahwa setiap dana pinjaman hanya digunakan untuk mencapai tujuan pemberian pinjaman tersebut". Namun apa yang tertera dalam piagam dasar pendirian ini ternyata tidak diikuti oleh upaya serius dan seimbang dari Bank Dunia dalam mengontrol arus hutang. Bank Dunia-dalam temuan Jeffery Winters-lebih banyak memberikan perhatian pada upaya pembukaan proyek-proyek dan pinjaman baru ketimbang mengusut korupsi yang dipakai melalui mekanisme hutang. Kurangnya perhatian ini juga disebabkan oleh motif pemberian hutang yang terkait dengan keinginan melanggengkan dominasi kepentingan Amerika Serikat yang punya pengaruh besar dalam Bank Dunia.⁷

Dominasi kepentingan ini sangat menonjol pada sejumlah prasyarat pada setiap pemberian hutang yang baru. Negara-negara donor yang tergabung dalam CGI memberikan banyak pekerjaan rumah yang musti dikerjakan diantaranya adalah dikeluarkannya sejumlah produk per-UUan⁸ serta proyek swastanisasi beberapa sektor penting seperti Semen, Bank, Telkom dan Listrik. Tuntutan agar pemerintah makin rajin menjalankan swastanisasi mendapat perlawanan yang tak kalah sengit baik dari Dewan maupun masyarakat lokal. Dengan mengutip motif untuk 'penyehatan' pemerintah tak bisa berkelit bahwa programnya sebenarnya mengikuti 'perintah' dari negara-negara donor. Bahkan untuk program yang 'mustahil' pemerintah dengan sigap mematuhinya,⁹ seperti anjuran untuk pembekuan asset-asset dana teroris. Padahal belum ada bukti yang sah tapi pejabat-pejabat yang terkait mulai mendukung setiap usaha

pembekuan dana tersebut. Argumentasi yang bisa membantu untuk menjelaskan

⁷Salah satu sebab mengapa Bank Dunia tidak bertindak sesuai mandat adalah motif geopolitik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa "Partisipasi AS dalam Bank Dunia selama masa Perang Dingin banyak disebabkan lembaga tersebut dapat dimanfaatkan untuk menahan ekspansi komunisme di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, Amerika Serikat sangat kuat terhadap pemberontakan komunis di negara-negara Sub Sahara Afrika, Bank Dunia tetap aktif di daerah tersebut meskipun telah lama diketahui bahwa pemerintah negara-negara tersebut mengkorupsi dana yang dipinjamnya" Lihat Jeffery Winters, *Op Cit.*

⁸Ada beberapa UU yang menjadi PR CGI buat Megawati yakni; UU Keuangan Daerah; UU Money Laundering; UU Keuangan Negara; UU Kelistrikan; Kepres Pengamanan Pangan Nasional; PP Usaha Kecil dan Menengah; PP Lembaga Keuangan Mikro; Restrukturisasi Perbankan; Divestasi BCA dan Bank Niaga. Lih Kontan 5 November 2001.

⁹Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muljohardjo, telah 'menyengat' berbagai organisasi massa Islam dengan mengatakan pada wartawan pada 24 Oktober 2001 bahwa Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Bank Indonesia untuk membekukan rekening 28 organisasi yang diduga punya kaitan dengan Osama bin Laden. Sebelumnya Megawati memang dapat surat dari PBB dengan lampiran Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebut 28 organisasi yang tergolong teroris. Bahkan Kepala BIN A.M Hendropriyono yang memperhatikan secara serius surat itu kebingungan dengan mengatakan, yang mau dibekuin apaan? Sikap Kejaksaan Agung inilah yang kemudian menuai badai protes bahkan sebagian komentar menunjukkan pemerintah seperti budak Amerika. Lih Forum Keadilan No 33, *Ada Apa CIA-BIN?*

kenyataan diatas, lagi-lagi, adalah kuatnya 'setiran' dari Amerika Serikat yang kali ini memprioritaskan program pembasmian terorisme dalam pemberian hutangnya. Di mana Indonesia, sebagai penduduk mayoritas muslim, punya 'peluang besar' menjadi negara tempat kaum teroris beroperasi.

Bagi negara yang penguasanya memang tidak memiliki posisi berunding yang baik maka hutang memang telah jadi pilihan agar rezim bisa bertahan. Padahal membumbungnya jumlah hutang mau tidak mau akan memaksa pemerintah memangkas berbagai program kesejahteraan buat rakyat. Meskipun dalam skema pemberian hutang baru ada kebijakan untuk memprioritaskan pengurangan kemiskinan tapi di tengah sempitnya lahan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang mengecewakan maka 'pemberantasan kemiskinan' jadi program yang mustahil. Pada sisi yang lain, rakyat yang 'geram' dengan perilaku korupsi pejabat-pejabat pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena hukum tetap saja lumpuh. Usaha pemerintah yang tak serius dalam berbagai bidang-dari ekonomi, hukum hingga keamanan-keberhasilan meraup hutang akan membawa resiko buruk bagi kehidupan rakyat.

Hutang & Penderitaan Rakyat

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi (KPI) dan INFID, terdapat hitungan menarik tentang jumlah hutang berikut bunga yang harus dibayar Indonesia. Dalam hitungan KPI jumlah hutang luar negeri pemerintah berikut bunganya tahun 2001 ini setara dengan 91% penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena menyerap PPN begitu besar, pemerintah terpaksa

mengurangi subsidi beberapa kebutuhan pokok masyarakat seperti subsidi bahan bakar minyak, listrik dan dana kesehatan. Dengan dicabutnya subsidi, kita sekarang merasakan, betapa mahalnyanya biaya listrik, harga obat dan biaya kesehatan. Pada tahun 1999 saja sekitar US\$ 9 milyar atau seperempat dari pendapatan negara dipakai untuk membayar utang sedang alokasi untuk kesehatan hanya US\$ 400 juta. Jadi sederhananya, orang Indonesia mengeluarkan US\$ 45 untuk bayar utang luar negeri dan domestik sedangkan ia hanya menerima US\$ 2 untuk perawatan kesehatan. Ikut serta dalam 'program mahal' ini adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, dari sandang, pangan, papan dan pendidikan. Yang memang paling terasa adalah tingginya ongkos transportasi dimana pendapatan mayoritas rakyat miskin dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁰

Dengan berkurangnya uang yang bisa dibelanjakan oleh pemerintah maka perolehan pendapatan pemerintah tak lain adalah menggenjot pajak dan restibusi. Tidak heran bila tiap tahun Pajak Bumi dan Bangunan terus naik sementara itu pelayanan dan pengelolaan fasilitas publik

¹⁰Seperti dinyatakan oleh Ofyar Z Tamin pada diskusi 'Program Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Jasa Transportai Publik' dikatakan bahwa masyarakat kelas bawah Jakarta mengeluarkan 40% pendapatannya dalam sebulan untuk keperluan transportasi. Ongkos yang dikeluarkan untuk transportasi warga miskin jauh lebih besar ketimbang ongkos yang dikeluarkan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Dampak lanjutanya tingginya pengeluaran ini harus mengurangi ongkos pengeluaran di pos-pos lain, seperti makan, pakaian, keesehatan dan pendidikan. Lih Koran Tempo 14 November 2001.

makin memprihatinkan. Kondisi ini makin mengesankan mengingat pemerintah secara ironis tak mampu memangkas pengeluaran yang besar. Beberapa perhelatan kenegaraan digelar dengan memangkas uang rakyat yang mestinya dapat dihemat, seperti Sidang Tahunan MPR yang memakan biaya Rp 18,7 miliar yang nyaris tak menghasilkan apa-apa. Apalagi jika merujuk pada beberapa kasus ledakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, seperti korupsi Rp 40 Miliar yang menguras harta Bulog. Patut dihitung pula pengorbanan rakyat atas perbaikan dunia Perbankan sebesar Rp 647,5 triliun yang tak kunjung beres menunjukkan rendahnya *sense of crisis* pemerintah. Dana 'perbaikan Bank' itu dari mana lagi, kalau tidak mengutip pajak dari rakyat.

Kondisi muram pemerintah inilah yang membuat sektor lapangan kerja berjalan seperti siput. Proyek pemiskinan penduduk ini bahkan ditunjang dengan kebijakan keras pemerintah dalam mengusir kaum miskin kota. Untuk mengutip data di Jakarta saja, menurut catatan Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) selama bulan Agustus-November 2001, Pemrov telah mengusir 6700 kepala keluarga yang konon-menempati bangunan ilegal; menertibkan 2700 pedagang kaki lima dan 6000 pengemudi becak dengan 300 becak yang telah berhasil dirampas oleh pemerintah¹¹. Ironisnya Pemda Jakarta menguras dana Rp 20 miliar untuk membangun patung-patung di sudut jalan protokol yang alasannya untuk menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota yang heroik (!)¹² Sulit jika kita merasa pemerintah cemas dengan tingginya hutang karena banyak program pembangunan yang sebenarnya sangat merugikan kepentingan luas rakyat. Tidak tampak *sense of crisis* pemerintah dalam melihat beban hutang yang niscaya membebani kehidupan rakyat banyak.

Bahkan pemerintah tak juga berusaha untuk mendapat penghapusan utang padahal ada peluang untuk memperolehnya. Memang untuk mendapat *debt relief* (keringanan utang) pemerintah perlu dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti penegakan hukum, konsep penguatan ekonomi rakyat dan penyelesaian masalah pengangguran. Namun karena Indonesia kini berada dalam posisi sebagai negara miskin maka punya peluang untuk memperoleh hutang dari IDA (International Development Bank) yang memang tidak berbunga meskipun jumlah hutang yang diperoleh sangat kecil. Menariknya utang IDA ini hanya boleh untuk program-program yang bersifat sosial, pangan, kemanusiaan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Tapi lagi-lagi, tugas terpuang pada pemerintah apakah memang memiliki kemampuan untuk membuat program yang andal bagi semua persoalan diatas. Kebocoran bantuan keuangan yang sering tersiar membuat banyak pihak kuatir dengan kemampuan pemerintah. Apalagi dengan sikap negara-negara donor yang tidak peduli dengan pemanfaatan bantuan keuangan.

Beberapa negara donor, seperti Jepang lebih banyak mengutip untung dalam pemberian hutang. Jepang yang sangat getol pada swastanisasi listrik menjalankan kebijakan yang sangat diskriminatif. Jepang biayai listrik yang harganya 5 dollar per kwh, tapi rakyat hanya mampu membayar 3,5 sen per kwh. Karena Jepang dengan

¹¹Lih Koran Tempo 16 Nov 2001.

¹²Kata Sutiyoso sang guburnur Jakarta, pembangunan itu untuk alasan kepentingan estetika kota Jakarta dan bahkan ia berkilah di negara-negara maju pembangunan patung itu sudah merupakan hal yang biasa. Lih Koran Tempo 14 November 2001.

swastanisasi listrik sudah sampai disini maka Jepang memberi hutang kepada pemerintah agar mampu membayar 5 dolar per kwh.¹³ Hubungan eksploitatif dalam pemberian hutang ini sudah jadi bagian dari kepentingan mayoritas negara-negara donor.¹⁴ Itu sebabnya pada jangka panjang pengaruh tingginya hutang ini akan berdampak pada pemerosotan kehidupan sosial rakyat dan secara mencolok itu sudah berlangsung. Kebijakan pemotongan anggaran untuk pengeluaran sektor-sektor publik membawa implikasi pada tingginya ongkos pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kaum perempuan adalah korban pertama dari krisis ini karena harus menanggung beban kebutuhan-kebutuhan pokok yang melambung.¹⁵ Arus tenaga kerja perempuan makin murah dan yang memprihatinkan jumlah perdagangan kaum perempuan di Indonesia baik antar kota maupun antar negara mencapai skor yang tinggi.

Sementara itu yang terjadi pada anak-anak serupa yakni tingginya beban hidup membuat mayoritas mereka harus bekerja pada lapangan kerja yang sangat rawan. Yang paling menyedihkan anak-anak perempuan yang diperdagangkan juga berada dalam jumlah yang sangat tinggi. Kondisi demikian nampaknya juga terjadi di banyak negara yang terbelit hutang, seperti yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin. Taraf hidup negara-negara Amerika Latin, menurut laporan Badan Pangan & Pertanian PBB (FAO), sejak tahun 1981 merosot mencapai angka 50%. Bahkan Peru, misalnya, 63% rumah tangganya tidak memiliki kecukupan pangan dan sementara di Bolivia, hanya dalam jangka 12 bulan harga bahan pangan melonjak sampai sepuluh kali lipat. Dalam keadaan seperti ini, lagi-lagi yang paling menderita adalah anak-anak dan kaum perempuan.

Tak beda jauh dengan nasib kaum petani, yang harus rela menjual harga panennya dengan patokan di bawah standar. Sejak kedatangan IMF di Indonesia terdapat kebijakan yang berubah, menyangkut tentang peran Bulog dan impor

¹³Lih Dialog dengan Zumrotin K Susilo, Pemerintah masih korup dan tak berkeadilan sosial, Kontan 5 November 2001.

¹⁴Adalah Jepang pula yang menginstruksikan kepada Indonesia melalui IMF-karena Jepang pemegang saham terbesar-untuk menetapkan tarif 20% untuk gula. Padahal Jepang sendiri menetapkan tarif 80%. Jepang menyarankan hal itu karena tak ingin industri gulanya diserang oleh Indonesia. Inggris-pemilik saham IMF-ingin membuka pasar di Indonesia sehingga Thames Water bisa membeli Jakarta bagian barat untuk penyediaan air bersih. Mereka berinvestasi sekarang untuk 10 tahun. Setelah itu mendapat lisensi untuk mencetak uang. Sebab, mereka ingin mengumpulkan ikan dari Jakarta Barat tapi uang akan mengalir langsung ke London. Tapi mereka tidak mengembalikan ke rupiah melainkan ke dalam bentuk dollar. Lih Ann Pettior, *IMF Harus Berhenti Mendanai Koruptor*, Tempo 1 Juli 2001.

¹⁵Dari pantauan Tempo terdapat kenaikan drastis harga-harga kebutuhan pokok ketika muncul kebijakan BBM dinaikkan seperti harga cabai merah naik dari Rp 6500 menjadi Rp 8000 perkilo; cabai hijau mendaki dari Rp 4000 ke Rp 5000; bahkan cabe rawit langsung meroket dari Rp 4000-5000 menjadi dua kali lipatnya. Harga bawang merah merangkak naik dari Rp 7000 menjadi Rp 8000 per kilogram; sedang bawang putih naik dari kisaran Rp 6000-6500 menjadi Rp 8000-Rp8500 per kilo. Salah satu 'rakyat kecil' yang diwawancarai komentarnya tentang kenaikan ini semua "Sekarang benar-benar hidup gali lubang tutup lubang. Tak ada gaji yang tersisa setiap akhir bulan" Lih Majalah Tempo 1 Juli 2001.

beras. Bulog, yang pada masa lalu mengambil peran sebagai penstabil persediaan pangan kini-oleh pemerintah IMF-hanya menjadi badan yang berfungsi membeli beras. Bahkan IMF memaksa pemerintah untuk menghapus subsidi pupuk dan membolehkan impor beras dengan bea masuk nol (pada pertengahan 2000, pemerintah kembali menetapkan bea masuk 30%). Anjuran IMF ini telah memangsa petani yang akhirnya terjatuh dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dengan kata lain, petani memang dipaksa untuk tidak berkutik dengan kebijakan pemerintah bahkan beberapa kalangan pemerintah ada yang dengan sembrono menyalahkan keadaan ini pada petani.

Kebingungan rakyat juga makin membesar karena pemerintah selalu tidak transparan dalam menjelaskan tiap kebijakan yang muncul karena 'perintah' IMF. Sebut saja kenaikan BBM, rakyat hanya disodori hasil akhir yaitu berupa besarnya angka subsidi dan berapa persen harga BBM harus naik. Paling-paling yang mencoba dijadikan hiburan buat rakyat adalah janji akan adanya kompensasi buat orang miskin, yang kini jumlahnya mencapai angka 33,5 juta orang. Lagi-lagi dana kompensasi itu juga tak jelas mekanisme penyalurannya seperti apa, mengingat amburadulnya penyaluran JPS (Jaring Pengaman Sosial) dan KUT (Kredit Usaha Tani) pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kompensasi inipun kurang menyentuh, kaum miskin yang sesungguhnya; seperti kompensasi untuk pengusaha kecil dan menengah yang ditinjau dari sisi golongan pastilah bukan termasuk orang miskin.

Rakyat memang berada dalam posisi 'terdepan' untuk diajak berkorban. Apalagi jika mengingat jumlah hutang yang terus membumbung. Pada tahun 2000 saja, total utang swasta maupun pemerintah

mencapai angka US\$ 150 miliar, dimana sebanyak US\$ 40 miliar merupakan utang ke Bank Dunia, IMF serta Bank-Bank pembangunan lain dan sebesar US\$ 31 miliar merupakan utang bilateral. Sisanya sebanyak US\$ 77 milyar merupakan utang swasta. Yang gawat sebesar US\$ 20 miliar itu merupakan utang jangka pendek. Sehingga pada tahun 2000 saja Indonesia harus menyisihkan 50% dari US\$ 5 miliar untuk membayar utang-utang tersebut. Indonesia memang tepat, seperti laporan yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's-lembaga pemeringkat utang yang berkedudukan di Amerika- telah berada dalam peringkat CCC; artinya Indonesia diragukan kemampuannya dalam membayar utang.¹⁶

Kesimpulan

Utang boleh saja gawat dan bahkan posisi Indonesia dapat saja diletakkan pada peringkat sebagai negara miskin, tapi kita ternyata masih punya penduduk yang digolongkan sebagai orang kaya di dunia.¹⁷

¹⁶Diragukan karena ada sejumlah indikator yang memperlihatkan betapa gawatnya posisi utang Indonesia, pertama tiak imbangnya rasio utang luar negeri dengan ekspor, pengalaman menunjukkan utang luar negeri akan membunyikan tanda bahaya jika mencapai dua kali lipat hasil ekspor; padahal selalu saja melampaui ambang batas itu. Kedua Pinjaman jangka pendek (tagihan utang satu sampai 12 bulan) selalu melampaui cadangan devisa; ketiga ancaman defisit anggaran; keempat neraca pembayaran akibat pelarian modal serta ekspor yang tersendat. Lih Koran Tempo 9 November 2001.

¹⁷Rachman Hallim, pemilik Gudang Garam dan Putera Sampoerna, pemilik pabrik rokok PT HM Sampoerna masuk dalam daftar 538 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Indonesia memang dikenal 'prestasinya' dalam memasok orang-orang kaya, pada tahun

Sama saja dengan posisi BPPN tempat disimpannya 'harta karun negara' senilai Rp 400 triliun, yang populer sebagai tempat 'sarang para penyamun'. BPPN punya tugas, yang dapat meringankan beban utang, yakni dengan penjualan asset-asset di dalamnya. Tapi tiga tahun berdiri asset yang dijual ternyata hanya 8% kalah jauh dengan Thailand dan Korea yang mampu meningkatkan penjualan asset sebesar 70% dan 50%. Selain itu, lagi-lagi di dalam BPPN sendiri, ternyata banyak tikus yang bermain korupsi di dalamnya. Padahal peluang penjualan asset ini, merupakan salah satu jalan, untuk meringankan utang. Kita ingat saja, kalau kita punya utang bukankah cara yang biasa kita lakukan pertama, adalah menjual barang yang kita miliki.

Baik ditempuh upaya untuk menekan penghapusan utang sebagaimana secara berhasil telah diperjuangkan oleh Jubilee plus-kini namanya Jubilee 2000. Pada akhir 2000 organisasi ini sukses dalam peranya menghapus utang sejumlah US\$ 100 miliar utang 40 negara miskin. Apalagi kenyataan membuktikan, bagaimana hutang itu telah digunakan bukan untuk hajat hidup rakyat melainkan memperpanjang usia rezim. Soeharto berhutang untuk membeli senjata yang digunakan untuk membunuh rakyat. Apalagi manajemen pemberian hutang, yang diberikan oleh kreditor Barat selama ini, memang 'memaksa' setiap orang untuk berhutang dalam pasar International. Akibat yang diderita, misalnya oleh Indonesia, adalah membungunya utang swasta yang sialnya pembayarannya ditanggung oleh rakyat banyak. Apalagi terbukti IMF bekerja demi kepentingan-kepentingan para pemegang saham di dalamnya, termasuk disini adalah Jepang, Amerika, Inggris dan negara-negara donor yang lain. IMF bukan bekerja dengan orientasi perlindungan dan pelayanan terbaik untuk rakyat negara-

negara penghutang tapi lebih pada usaha *menjagal* keinginan negara untuk berdiri secara merdeka.

Repotnya usaha untuk menghapus utang tidak mendapat dukungan besar dari kalangan pemerintah sendiri dan bahkan sebagian besar kalangan ekonom dari perguruan tinggi. Pemerintah gilanya, memiliki kebanggaan dengan berhutang bahkan tak mau minta keringanan karena cemas jika disebut sebagai negara yang bangkrut. Ketakutan kalau nanti disebut bangkrut maka investasi tak akan mungkin masuk dan itu jelas akan merusak legitimasi rezim yang berkuasa. Pengalaman Meksiko yang mengumumkan ketidakmampuan dalam membayar hutang, tepatnya pada 13 Agustus 1982, dianggap sebagai contoh buruk dalam penanganan utang. Dengan menolak membayar utang, beberapa ekonom, menyebutkan Indonesia akan kehilangan akses pasar International. Kebutuhan yang mutlak harus difasilitasi untuk saat ini jika mau keluar dari krisis ekonomi.

Maka jalan yang ditempuh adalah penjualan asset dengan mempercepat swastanisasi. Kebijakan inipun ditempuh pemerintah dengan sangat sembrono, misalnya melakukan privatisasi terhadap asset yang berhubungan dengan kepentingan luas publik. Program privatisasi inipun tidak mendapat dukungan hukum yang mencukupi sehingga beralihnya ke tangan swasta, seperti air minum, listrik, telpon dan transportasi akan menaikkan biaya yang lebih menekan kehidupan rakyat. Aturan main, transparansi dan akses publik pada program privatisasi

1996 saja Indonesia mengirimkan 10 orang terkaya dunia. Menarik judul Tempo dengan huruf besar menyebut Orang Terkaya Sejagat dari Negeri Miskin, Tempo 1 Juli 2001.

yang terbatas membuat program ini bisa-bisa menjadi bumerang. Itu misalnya terlihat dalam proyek swastanisasi Semen Gresik pada Cemex yang membuat masyarakat padang akhirnya merebut pabrik Semen tersebut. Memang ada banyak pihak yang masih keberatan bila perusahaan negara yang mengurus hajat hidup orang banyak diserahkan pada swasta.

Memang utang adalah persolan besar yang menghadang negara kita dan penyelesaian yang dibikin pemerintah, lebih banyak mengail bencana ketimbang solusi. Janji pemerintah yang terlalu besar pada negara donor telah menjerat kehidupan rakyat dan perlu ada langkah konkret untuk menyelesaikan. Untuk menghela ekspor nampaknya juga bukan jalan mudah karena pertumbuhan ekonomi masih diganggu oleh gonjang-ganjing politik. Penulis menilai pemerintah perlu untuk melakukan penghematan besar, khususnya melalui restrukturisasi beberapa institusi yang ada, macam BPPN. Yang patut dikerjakan lainnya adalah memburu koruptor yang untuk ini harus ada jaminan hukum yang tegas. Para koruptor yang mencuri uang negara wajib diadili dan dimintai ganti rugi karena mereka-lah yang paling banyak menikmati hutang. Ujung dari itu yang tak kalah penting adalah melibatkan rakyat secara aktif pada persoalan hutang. Jangan sampai ketika berhutang, pemerintah pegang peran tapi ketika membayar rakyat yang berperan. Untuk itu perlu diawasi setiap program pembangunan yang didanai oleh hutang! ●

Daftar Bacaan

A. Chaniago, Andrinof, 2001, *Gagalnya Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Budiman, Arief, 1996 *Teori Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arief dan Tornquist Olle, 2001, *Aktor Demokrasi, Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*: ISAI.

Costa Dalla Mariasora & Giovanna F Dalla Costa, 2001. *Kaum Perempuan & Politik Strategi Ekonomi Internasional*, Jakarta: Kalynamitra.

Hale, Angela, 2000, *Perdagangan Dunia Merupakan Masalah Perempuan*, Jakarta: Kelompok Kerja Humanika.

Topatimasang, Roem, 1999, *Hutang Itu Hutang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thompson, Grahame & Paul Hirst, 2001 *Globalisasi Adalah Mithos*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Jurnal & Majalah

Jurnal Wacana (Yogyakarta) Edisi 3 tahun II 1999

Edisi 5 tahun III 2000.

Tempo (Jakarta) Edisi 25 Juni-1 Juli 2001

Edisi 20-26 Agustus 2001.

Edisi 27 Agustus-2 September 2001.

Edisi 12-18 November 2001.

Koran Tempo (Jakarta) 6 November 2001.

9 November 2001.

Koran Kompas (Jakarta) 5 November 2001.

18 Oktober 2001.

Tabloid Kontan (Jakarta) 5 November 2001.